



Buletin-KCBI/Edisi 2/Okttober 2021

Buletin

KCBI



**CENDEKIAWAN
BUDDHIS SE-INDONESIA MERAPATKAN
BARISAN, SALING MENDUKUNG DAN
MENGAMALKAN DHARMA AGAMA DAN
DHARMA NEGARA**

**DIALOG NASIONAL
LINTAS AGAMA DI MASJID ISTIQLAL,
WALUBI AJAK UMAT PANCARKAN
KASIH SAYANG BAGI SEMUA
MAKHLUK**



0812 8999 0096



kcbi1994



1994kcbi@gmail.com



Buletin-KCBI/Edisi 2/Okttober 2021

Tim Buletin KCBI

Pelindung:
dra. S. Hartati Murdaya

Penasihat:
Y.M. Bhikkhu Dhammaduddho/
Victor Jaya Kusuma S.Kom, M.M, BKP

Pimpinan Redaksi:
Eric Fernando, S.I.P.

Sekretaris Pemred:
Yiu Cen

Designer:
Erika Tanuwijaya

Social Media KCBI:

1994kcbi@gmail.com

0812 8999 0096

kcbi1994



DAFTAR ISI

Buletin-KCBI/Edisi 2/Okttober 2021

LAPORAN UTAMA

- Cendekiawan Buddhis Se-Indonesia Merapatkan Barisan,
Saling Mendukung dan Mengamalkan Dharma Agama
dan Dharma Negara.....3

PEMIKIRAN

- Pluralisme & Toleransi Dalam Kajian Buddhism
Oleh Y.M Bhiksu Samantha Kusala Mahasthavira.....4

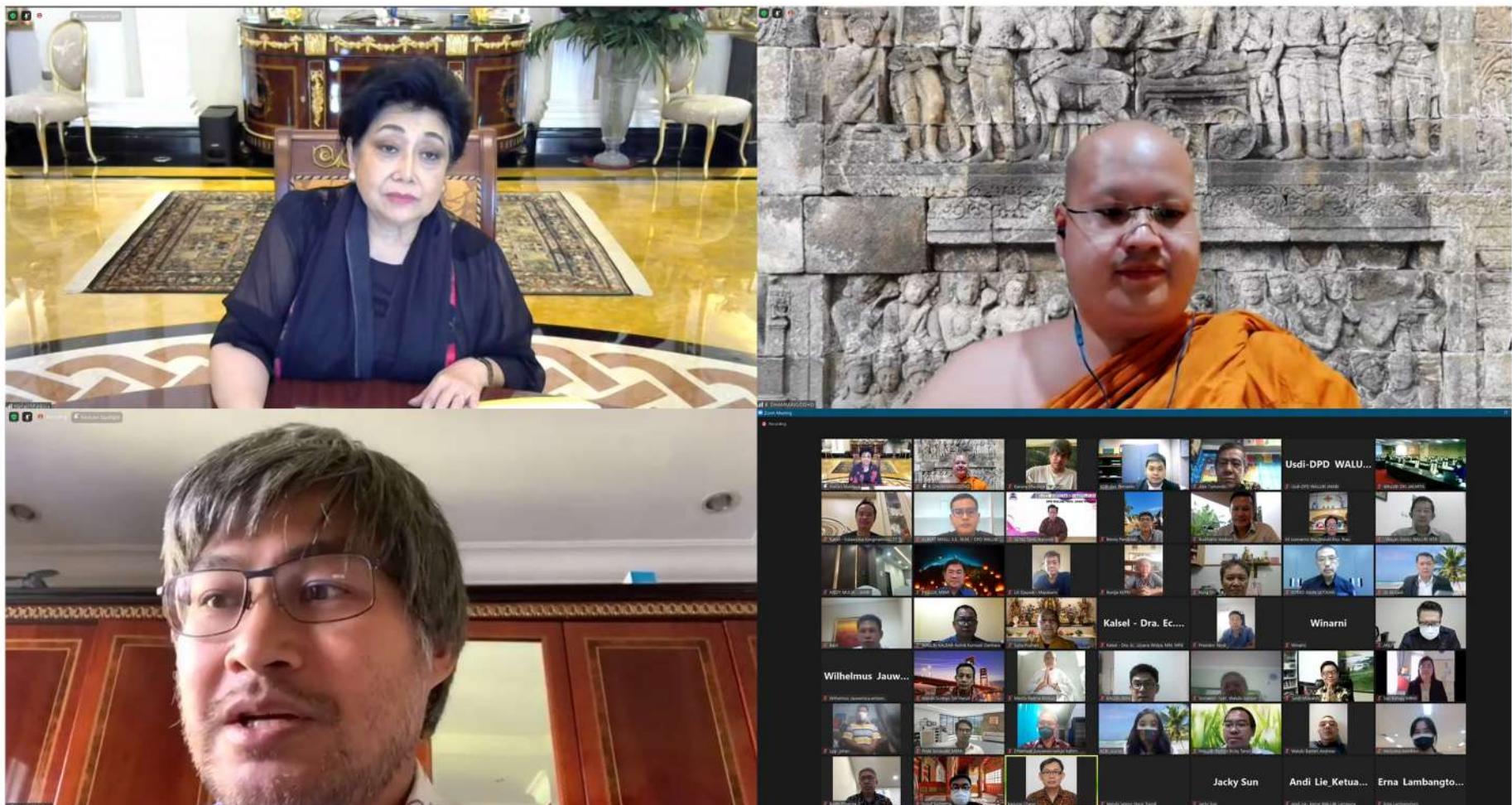
LAPORAN KEGIATAN

- WALUBI Jadi Narasumber Dalam Pra-Seminar Indeks
Kesalehan Sosial Kemenag RI.....7
- Dialog Nasional Lintas Agama di Masjid Istiqlal, WALUBI
Ajak Umat Pancarkan Kasih Sayang Bagi Semua
Makhluk.....8
- Konsisten Jadi Mitra Strategis Pemerintah, WALUBI
Diskusi Terbatas Dengan Kepala PKUB Kemenag RI
Perihal Peningkatan PBM Menjadi Perpres Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama.....9

- WALUBI Beri Sejumlah Catatan Tentang Penyiaran
Dalam FGD Komisi Penyiaran Indonesia.....10

CENDEKIAWAN BUDDHIS SE-INDONESIA

Merapatkan Barisan, Saling Mendukung dan Mengamalkan Dharma Agama dan Dharma Negara



Pada hari Jumat, 24 September 2021 telah berlangsung temu Cendekiawan Buddhis se-Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Dra. S. Hartati Murdaya.

Dalam kegiatan yang mengusung tema "Cendekiawan Buddhis Merapatkan Barisan, Saling Mendukung dan Mengamalkan Dharma Agama dan Dharma Negara" para cendekiawan yang sepakat untuk senantiasa mengamalkan Dharma Agama dan Dharma Negara demi terwujudnya kemajuan di setiap aspek kehidupan baik itu di Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Dra. S. Hartati Murdaya berpesan agar "Para cendekiawan Buddhis perlu merapatkan barisan, menegakkan kebajikan, melakukan karma baik sehingga memperoleh nasib peruntungan baik. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19, umat Buddha sering diajak diskusi oleh berbagai pihak bagaimana umat Buddha bisa mempercepat berakhirnya pandemi," ungkap Ketua Umum DPP WALUBI tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Y.M. Bhikkhu Dhammaduddho/Victor Jaya Kusuma yang menyampaikan "Cendekiawan Buddhis perlu menegakkan kebajikan, meningkatkan mutu komitmen dan pengamalan kecendekiawan, peningkatan pembelajaran dan koordinasi sistem jaringan informasi dan komunikasi di dalam maupun di luar negeri, mengembangkan pemikiran, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif, strategis, antisipatif dan berperan aktif mengembangkan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya umat Buddha Indonesia," ungkap Bhikkhu yang akrab disapa Bhante Victor ini.

Harapannya melalui kegiatan ini para cendekiawan Buddhis yang terhimpun di Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) dapat menjadi penunjuk arah yang tepat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan mengedepankan rasionalitas atau kecerdasan keilmuan dan juga religiusitas.

PLURALISME & TOLERANSI DALAM KAJIAN BUDDHISM

Oleh Y.M Bhiksu Samantha Kusala Mahasthavira



PLURALISME

Pluralisme terdiri dari dua kata *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing.

Berdasarkan *Webster's Revised Unabridged Dictionary* arti pluralisme adalah:

1. hasil atau keadaan menjadi plural.
2. keadaan seorang pluralis; memiliki lebih dari satu tentang keyakinan.

Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas), artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, gologan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan/atau sekelompok orang.

Toleransi atau **Toleran** secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorangan) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak.

Contoh sikap toleransi secara umum antara lain: menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan.

Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti:

1. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita;
2. Tidak mencela/menghina agama lain dengan alasan apapun; serta
3. Tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.

Turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber yakni perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (PGI) serta dihadiri perwakilan dari masing – masing utusan Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Buddha.

Dalam kegiatan tersebut, Karsan, S.Ag., M.Pd. selaku Kasubdit Kelembagaan, Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Ditjen Bimas Buddha Kemenag RI mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Eric Fernando, "Hal – hal yang disampaikan oleh saudara Eric perlu menjadi catatan khusus bagi tim puslitbang Kemenag RI agar dapat merevisi draft penelitian," tutup Karsan saat memberi masukan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan perbedaan latar belakang etnis, bahasa, suku, agama dan juga budaya.

Perbedaan yang negara kita miliki bukanlah sebagai alat sarkastisme yang menyebabkan terjadinya intoleransi dan juga diskriminasi terhadap perbedaan.

Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas), artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, gologan, agama, adat, hingga pandangan hidup.

Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan/atau sekelompok orang.

Perbedaan dan pluralisme adalah suatu kekayaan non materi yg di miliki bangsa kita. Sehingga seyogyanya dijadikan alat untuk mempererat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI yang berlandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Toleransi diperlukan untuk membangun mental yang fundamental dalam kehidupan berbangsa.

Pluralisme Sosial dalam Agama Buddha

Ketika Suku Sakya dan Suku Koliya ingin berperang karena memperebutkan air sungai Rohini. Sang Buddha dengan Mata Bathin-Nya mengetahui kejadian itu. dan Buddha dengan Kesaktian-Nya terbang ke udara, tepat ditengah tengah Sungai Rohini. Mereka langsung bersujud ketika mereka melihat Sang Buddha, Sang Buddha bertanya pada pimpinan dari kedua pihak itu, satu demi satu, akhirnya sampailah kepada pekerja harian. Pekerja harian itu menjawab:

“Pertengkarani ini hanya karena air sungai Rohini, Yang Mulia.” Kemudian Sang Buddha bertanya pada kedua Raja itu: “Berapakah nilai air sungai itu, Raja Mulia?”

“Sangat kecil nilainya, Yang Mulia.”

“Berapa besarkah nilai Khattiya (Negeri) ini, Raja Mulia?”

“Khattiya ini tidak ternilai, Yang Mulia.”

“Bukanlah hal yang baik dan pantas apabila hanya karena air yang sedikit ini kalian menghancurkan Khattiya (Negeri) yang tidak ternilai ini.”

Kedua pihak itu diam seribu bahasa. Sang Buddha berkata lagi: “O, Raja Mulia, mengapa kalian bertindak seperti ini? Apabila saya tidak ada di sini sekarang, kalian akan bertempur, membuat sungai ini berlimbah darah. Kalian tidak pantas bertindak demikian. Kalian hidup bermusuhan, menuruti hati yang diliputi lima jenis nafsu kebencian. Saya hidup bebas dari kebencian. Kalian hidup menderita karena sakit yang disebabkan oleh nafsu kejahatan. Saya hidup bebas dari penyakit. Kalian hidup dipenuhi keinginan, dengan memuaskan lima jenis hawa nafsu keserakahan. Saya hidup bebas dari segala nafsu keserakahan.” Setelah bersabda demikian, Sang Buddha mengucapkan syair-syair ini:

“Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci, di antara orang-orang yang membenci kita hidup tanpa membenci.” (Dhammapada, Sukha Vagga no. 1)

Pilar Raja Asoka

Pada mulanya raja Asoka mengikuti jejak ayahnya yang bernama Bidusara dan kakaknya yang bernama Chandragupta, berkeinginan untuk menyempurnakan penaklukkan seluruh India. Ia menyerbu dan menaklukkan kerajaan Kalingga dan sebagai akibat dari perang yaitu ratusan ribu penduduk yang tidak bersalah telah menjadi tewas, mendapat luka-luka berat dan ringan, serta yang luka-luka itu menjadi cacat. Ribuan rumah dan harta benda penduduk yang tak ternilai harganya itu menjadi musnah. Perang ini adalah yang terakhir.

Setelah Raja Asoka memeluk agama Buddha, berubahlah seluruhnya dan menjadi orang baru, yang disebabkan ajaran Buddhadhamma. Ia menerangkan kepada umum, bahwa ia tidak akan menggunakan senjatanya lagi, untuk menaklukkan negara-negara lain dan ia mengharapkan agar semua makhluk yang hidup dapat melakukan pengekangan diri, hidup bersih dan ramah tamah. Tentunya ini dapat dianggap sebagai kemenangan yang terbesar dari “YANG DIKASIHI OLEH PARA DEWA”, yaitu penaklukkan dengan cinta kasih.

Bukan saja raja Asoka menolak perang untuk dirinya sendiri, tetapi ia menyatakan juga keinginan agar “anak-anakku dan cucu-cucuku” tidak lagi berpikir tentang penaklukkan negara-negara lain sebagai sesuatu yang berharga untuk ditaklukkan. Mereka harus berpikir penaklukkan dengan cinta kasih yang berguna untuk di dunia ini dan di dunia lainnya.

Ini merupakan satu-satunya contoh dalam sejarah kemanusiaan dari seorang raja pada puncak kejayaannya, dimana masih mempunyai kesanggupan untuk melakukan penaklukkan daerah-daerah baru, tetapi menolak perang dan kekerasan, sebaliknya menginginkan perdamaian dan tanpa kekerasan (non violence).

Raja Asoka dengan nama lengkapnya, yaitu: ASOKA MAURIYA, dan ia sendirilah yang memberi contoh untuk dapat menjalankan pemerintahan secara adil dan bijaksana, penuh cinta kasih dan toleransi. Kemudian ditingkatkannya kesejahteraan rakyat, yaitu: dengan mendirikan rumah sakit sebanyak-banyaknya, sekolah, waduk, sumur, saluran untuk pengairan dan sebagainya. Inilah pelajaran untuk dunia masa kini. Pemimpin dari suatu kerajaan agung dan besar secara terbuka menolak perang dan kekerasan. Sebaliknya ia menjalankan ajaran-ajaran tentang perdamaian dan tanpa kekerasan, dan tidak terdapat bukti-bukti dalam sejarah, bahwa negara tetangganya telah mengambil keuntungan dari “cinta kasih” kerajaan Asoka dan menyerbu dengan kekuatan militernya atau ada terjadi pemberontakan, kerusuhan dalam negerinya pada waktu Asoka Mauriya masih hidup. Sebaliknya seluruh negeri berada dalam keadaan aman dan tenteram serta damai, dan negara tetangganya ternyata telah menerima kepemimpinannya.

Di dalam jaman Kerajaan Asoka Maurya, kebudayaan dan kesenian berkembang dengan pesatnya hingga mencapai puncaknya. Beliau yang telah berkorban demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Raja telah membuatnya khusus untuk melakukan puja bhakti kepada Buddha, dalam karya seninya yang sangat indah dan mengagumkan sekali telah dibuatnya. Di tempat-tempat yang bersejarah didirikannya stupa-stupa dan tugu-tugu untuk peringatan kepada Buddha, dengan ukiran-ukiran yang dipahat begitu mengagumkan sekali.

Selain daripada itu, raja Asoka giat sekali menyebarluaskan ajaran Buddhadhamma ke berbagai negeri dengan dikirimnya utusan-utusan ke India Belakang, Asia Tenggara dan lain-lainnya. Salah seorang utusan yang terpenting adalah putranya sendiri yang bernama Mahinda, yang diutus ke Srilanka dan Beliaulah yang menyebarluaskan ajaran agama Buddha di negeri ini, Hingga kini menjadi negara Buddhais. Semula adalah kecil, berpusat di sekitar daerah Timur Laut India, kemudian menjadi satu Agama yang sangat berpengaruh ajarannaya di seluruh tanah India, sehingga bisa menjadi suatu agama besar di dunia.

Asoka membangun ribuan stupa dan vihara bagi pengikut Buddha. Stupa-stupa di Sanchi sangat termasyhur dan stupa bernama Sanchi Stupa I di dirikan oleh Maharaja Asoka. Selama masa pemerintahannya, ia menganut kebijakan resmi anti-kekerasan (AHIMSA). Bahkan penyembelihan dan penyiksaan sia-sia terhadap hewan pun dilarang.

Melepaskan Pikiran

Margasatwa dilindungi dengan undang-undang sang maharaja yang melarang pemburuan untuk olahraga dan pengisian waktu luang. Pemburuan secara terbatas diperbolehkan untuk maksud konsumsi namun Asoka juga mempromosikan konsep vegetarianisme. Asoka juga menaruh belas kasihan kepada para narapidana di penjara. Mereka diperbolehkan mengambil cuti, sehari dalam waktu setahun. Ia berusaha meningkatkan ambisi profesional rakyat jelata dengan membangun pusat-pusat studi yang mungkin bisa disebut universitas. Ia juga mengupayakan sistem irigasi bagi pertanian. Rakyatnya diperlakukan secara sama, apapun derajat, agama, haluan politik, ras, suku bangsa dan kasta mereka. Kerajaan-kerajaan di sekeliling wilayahnya yang sebenarnya mudah ditaklukkan ia buat sebagai sekutu yang terhormat.

Asoka juga dipercaya membangun rumah-sakit untuk hewan dan merenovasi jalan-jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah di India. Setelah perubahan dirinya, Asoka dikenal sebagai Dhammashoka (bahasa Pali), artinya Asoka penganut Dhamma, atau Asoka yang Soleh. Bentuknya dalam bahasa Sansekerta adalah Dharmāsoka. Asoka kemudian mendefinisikan prinsip-prinsip dasar Dharma (Dhamma) sebagai tindakan anti-kekerasan, toleransi terhadap semua sekte atau aliran agama, dan segala pendapat, mematuhi orang tua, menghormati para Brahmana, guru-guru agama dan pandita, baik hati terhadap kawan, perlakuan manusiawi terhadap para pembantu, dan murah hati terhadap semua orang. Prinsip-prinsip ini menyinggung haluan umum etika berkelakuan terhadap sesama di mana tidak ada kelompok agama atau sosial yang bisa menentang.

Sumber banyak pengetahuan kita akan Asoka adalah prasasti-prasasti yang banyak ditinggalkannya dan dipahatkannya di pilar-pilar dan batu-batu di seluruh wilayah kekaisarannya. Maharaja Asoka juga dikenal sebagai Piyadasi (dalam bahasa Pali) atau Priyadarsi (dalam bahasa Sansekerta) yang berarti "berparas baik" atau "dikaruniai Dewa-Dewa dengan berkah baik". Semua prasastinya memiliki sentuhan kekaisaran dan menunjukkan rasa kasih sesama yang mendalam; ia menyapa rakyatnya dengan kata "anak-anakku". Prasasti-prasasti ini mempromosikan moral sesuai agama Buddha dan memberi semangat pada tindakan non-kekerasan serta keteguhan dalam melaksanakan Dharma (kewajiban atau tindakan yang bajik).

Prasasti-prasasti ini juga membicarakan ketenarannya dan negara-negara taklukkan serta juga negara-negara tetangga yang berusaha menghancurnykannya. Informasi tentang peperangan Kalinga juga bisa didapatkan dan juga tentang sekutu-sekutu Asoka. Lalu informasi mengenai pemerintahan sipil juga ada. Pilar-pilar Asoka di Sarnath adalah peninggalan Asoka yang paling dikenal. Mereka dibuat dari batu granit dan merekam kunjungan Asoka kepada maharaja Sarnath pada abad ke3 SM. Pilar ini memiliki pucuk berbentuk empat kepala singa yang berdiri membelakangi satu sama lain. Lambang India modern adalah keempat singa ini. Singa selain melambangkan kekuasaan Asoka, juga melambangkan sifat kerajaan sang Buddha (singa dianggap raja hutan yang merajai semua margasatwa dan Buddha adalah seorang pangeran mahkota).

Dalam menerjemahkan teks-teks yang berada pada prasasti di pilar-pilar ini, para sejarawan bisa mempelajari banyak tentang Kekaisaran Maurya. Namun sulit apakah yang tertulis di situ benar semua atau tidak. Yang jelas ialah teks-teks ini menunjukkan kepada kita bagaimana Maharaja Asoka ingin dikenang.

Pikiran yang tidak dipergunakan untuk berpikir tentang hal-hal positif akan cenderung menghasilkan pikiran negatif.

Seperti halnya ladang yang tidak ditanami dengan pohon atau tanaman, maka yang tumbuh subur adalah semak belukar dan rumput ilalang.

Selagi masih bisa berpikir, gunakanlah pikiran ini untuk menghasilkan karya-karya inovatif dan positif untuk kebahagiaan dan keselamatan makhluk lain, dan pikiran positif tersebut setelahnya kita lepaskan, dan pikiran untuk melepaskan pun dilepaskan.

Pikiran yang tidak diberi kesempatan untuk menghasilkan pikiran negatif, maka akan cenderung menghasilkan pikiran positif. Pikiran positif akan menghasilkan ucapan & perilaku positif. Jika setiap orang memiliki pikiran, ucapan dan perilaku positif, maka tidak akan menimbulkan sikap intoleransi, diskriminasi dan timbulnya pertentangan-pertentangan yang berakibat pada melemahnya ataupun pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa yang besar ini

Menghargai dan mensupport setiap kondisi yang tidak selamanya selalu sama, karena esensi dari sebuah kehidupan adalah menemukan kebahagiaan hakiki.

Mari kita membebaskan diri dari berbagai belenggu /rintangan bathin seperti sifat intoleran, ego sentris, dan sifat negatif lainnya yang justru akan menghancurkan diri sendiri terlebih dahulu ataupun kehancuran kehidupan lainnya. Demikian artikel ini dibuat, semoga bermanfaat menambah wawasan dan kebijaksanaan kita semua. Amituofo



WALUBI

Jadi Narasumber Dalam Pra-Seminar Indeks Kesalehan Sosial Kemenag RI



Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang Diklat Kementerian Agama RI mengadakan pra – seminar hasil survei indeks kesalehan (sosial) umat beragama pada 31 Agustus 2021 hingga 1 September 2021.

Bertempat di hotel Sari Pacific, Jakarta secara tatap muka, acara tersebut dibuka secara langsung oleh Prof. Dr. H. M. Adlin Sila, Ph.D. selaku Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag RI. “Perlu digaris bawahi bahwa yang diukur dalam riset ini adalah kesalehan sosial, bukan kesalehan ritual, adapun acara ini sifatnya adalah pra – seminar artinya laporan penelitian yang disajikan masih draft sehingga membutuhkan masukan – masukan dari ormas keagamaan,” ungkap Prof Adlin.

Dalam kegiatan tersebut, Konsultan peneliti Kemenag RI menyampaikan temuan – temuan dalam hasil riset, salah satu yang menarik yakni, “Orang yang pernah mengikuti pembinaan/seminar dari Kementerian Agama maka kesalehan sosialnya cenderung lebih tinggi dibanding yang tidak pernah ikut,” ungkap Farhan Munthafa, M.Stat yang juga Direktur Riset LK3P Universitas Indonesia ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut utusan dari WALUBI yakni Eric Fernando, “Kami mengapresiasi Kemenag RI yang mengundang ormas – ormas keagamaan untuk memberikan masukan dalam pra – seminar indeks kesalehan sosial ini, adapun kami memberikan sejumlah catatan khususnya faktor penghambat bagi umat Buddha antara lain belum terpenuhinya amanat UU 20/2003 Pasal 12 Ayat 1A karena di Indonesia saat ini masih kekurangan 7.927 guru agama Buddha, serta perlunya umat Buddha dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan peninggalan sejarah Buddha seperti di Kemenag, Kemenparekraf, Kemendikbudristek, Badan Otorita Borobudur, BUMN TWC dan lainnya,” tutur Eric Fernando.

Turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber selain WALUBI yakni perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (PGI) serta dihadiri perwakilan dari masing – masing utusan Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Buddha.

Dalam kegiatan tersebut, Karsan, S.Ag., M.Pd. selaku Kasubdit Kelembagaan, Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Ditjen Bimas Buddha Kemenag RI mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Eric Fernando, “Hal – hal yang disampaikan oleh saudara Eric perlu menjadi catatan khusus bagi tim puslitbang Kemenag RI agar dapat merevisi draft penelitian,” tutup Karsan saat memberi masukan.



DIALOG NASIONAL

Lintas Agama di Masjid Istiqlal, WALUBI Ajak Umat Pancarkan Kasih Sayang Bagi Semua Makhluk



Badan Pengelola Masjid Istiqlal mengadakan Dialog Nasional Lintas Agama bertema “Dengan Berbekal Iman, Ilmu, dan Amal Kita Siap Hidup Bersama Covid-19 Pasca Pandemi” pada 7 September 2021.

Jandi Mukianto, S.H., M.H. selaku Wakil Pelaksana Harian DPP WALUBI hadir sebagai narasumber yang turut dihadiri K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI); Anies R. Baswedan, Ph.D. (Gubernur DKI Jakarta); Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI); Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar(Imam Besar Masjid Istiqlal); Pdt. Gomar Gultom (Ketua Umum PGI); Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo (Ketua Umum KWI); Mayjen TNI (Purn.) Wisnu B. T. (Ketua Umum PHDI); Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Ketua Umum MATAKIN); Laksamana Pertama TNI (Purn.) Asep Saepudin (Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat BPMI)

Wakil Presiden RI (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk menyiapkan kajian yang dapat dijadikan pedoman umat dalam menjalani kehidupan di era endemi COVID-19. Ma'ruf menilai tokoh agama dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hidup bersama COVID-19 ketika telah menjadi endemi.

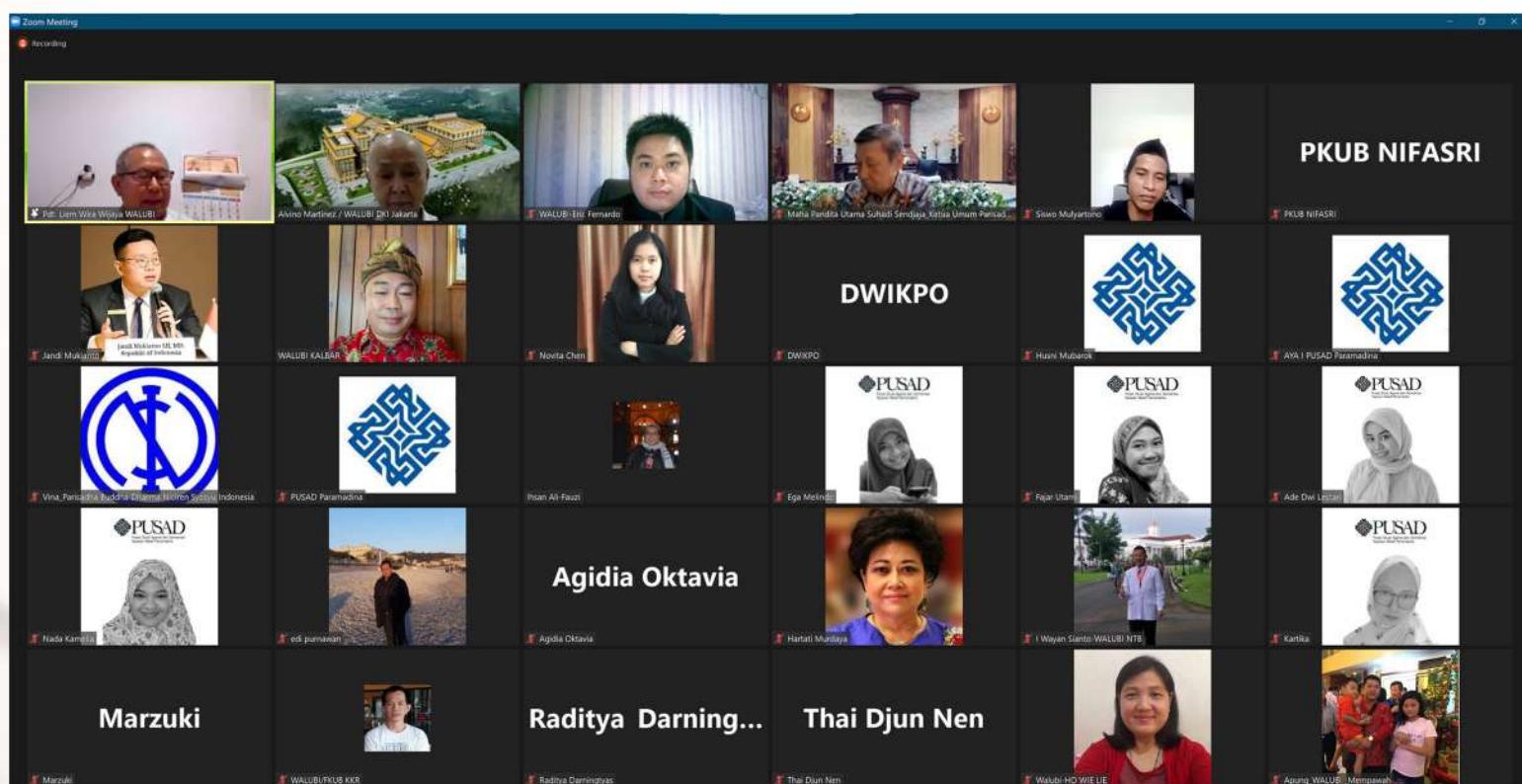
"Sebagaimana yang telah dilakukan selama masa pandemi, para tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyongsong era pascapandemi, yaitu untuk menjaga dan memberikan motivasi serta membangkitkan semangat umat baik dari sisi keagamaan, sosial maupun ekonomi, serta tetap menjaga keharmonisan dalam masyarakat," kata Ma'ruf dalam dialog virtual nasional lintas agama yang disiarkan di YouTube Masjid Istiqlal TV, Selasa (7/9/2021).

Sementara itu, Jandi Mukianto dari WALUBI menyampaikan “WALUBI mengapresiasi langkah – langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran kementerian dan stakeholder lainnya serta para organisasi lintas agama yang telah bergotong – royong menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Jandi.

“Kami di WALUBI bekerja sama khususnya dengan TNI turut berperan aktif melakukan penyelenggaraan vaksinasi di berbagai wilayah se-Indonesia. total se-Indonesia sudah lebih dari 350.000 penerima vaksin dari sentra vaksin WALUBI, WALUBI bersama para Bhikkhu Sangha, tokoh agama, majelis – majelis dan vihara se-Indonesia senantiasa mengedukasi umat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mendukung pelaksanaan vaksinasi” tutur Jandi yang juga seorang pengacara ini.

KONSISTEN JADI MITRA STRATEGIS PEMERINTAH

WALUBI Diskusi Terbatas Dengan Kepala PKUB Kemenag RI Perihal Peningkatan PBM Menjadi Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama



Pada hari Jumat, 17 September 2021 telah berlangsung diskusi terbatas antara WALUBI dengan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI, Dr. H. Nifasri, M.Pd yang difasilitasi oleh PUSAD Paramadina membahas peningkatan regulasi PBM menjadi Peraturan Presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama.

WALUBI di bawah kepemimpinan dra. S. Hartati Murdaya selaku Ketua Umum konsisten menjadi mitra strategis pemerintah baik sebagai wadah bermusyawarah antar umat beragama sesuai KMA 35/1980 maupun dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sesuai PBM 9/2006 dan 8/2006.

Dalam hal ini, wujud konkret konsistensi WALUBI sebagai mitra pemerintah adalah utusan – utusan WALUBI menjadi representatif umat Buddha baik di FKUB tingkat Provinsi maupun FKUB tingkat Kota/Kabupaten.

Dalam diskusi tersebut, Dr. H. Nifasri, M.Pd. menyampaikan “Rekomendasi dari lembaga keagamaan diperlukan untuk mengirim utusan ke FKUB, selain itu FKUB perlu ditempatkan dalam posisi strategis, bukan sekedar menjadi pemadam kebakaran yang baru muncul saat terjadi permasalahan; harapannya dengan ditingkatkan dari PBM ke Perpres maka pemerintah daerah dapat mendorong kerja-kerja FKUB lebih maksimal karena diikat oleh regulasi yang lebih tinggi,” ungkap Kepala PKUB Kemenag RI tersebut.

Sementara itu, Alvino Martinez dari DPD WALUBI DKI Jakarta menyatakan, “Dalam pelaksanaan sehari – hari, FKUB membutuhkan dukungan pemerintah, dalam pengalaman saya sebetulnya di Jakarta banyak pemuka agama yang aktif dan turun ke lapangan untuk mencegah terjadinya konflik,” tutur Alvino yang juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta.

Intan KPIP

A

WALUBI

Moh. Nur Huda

Beri Sejumlah Catatan Tentang Penyiaran Dalam FGD Komisi Penyiaran Indonesia

Irsal Ambia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga independen setingkat lembaga negara dengan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia mengadakan focus group discussion (FGD) bersama sejumlah organisasi lintas agama di Indonesia.

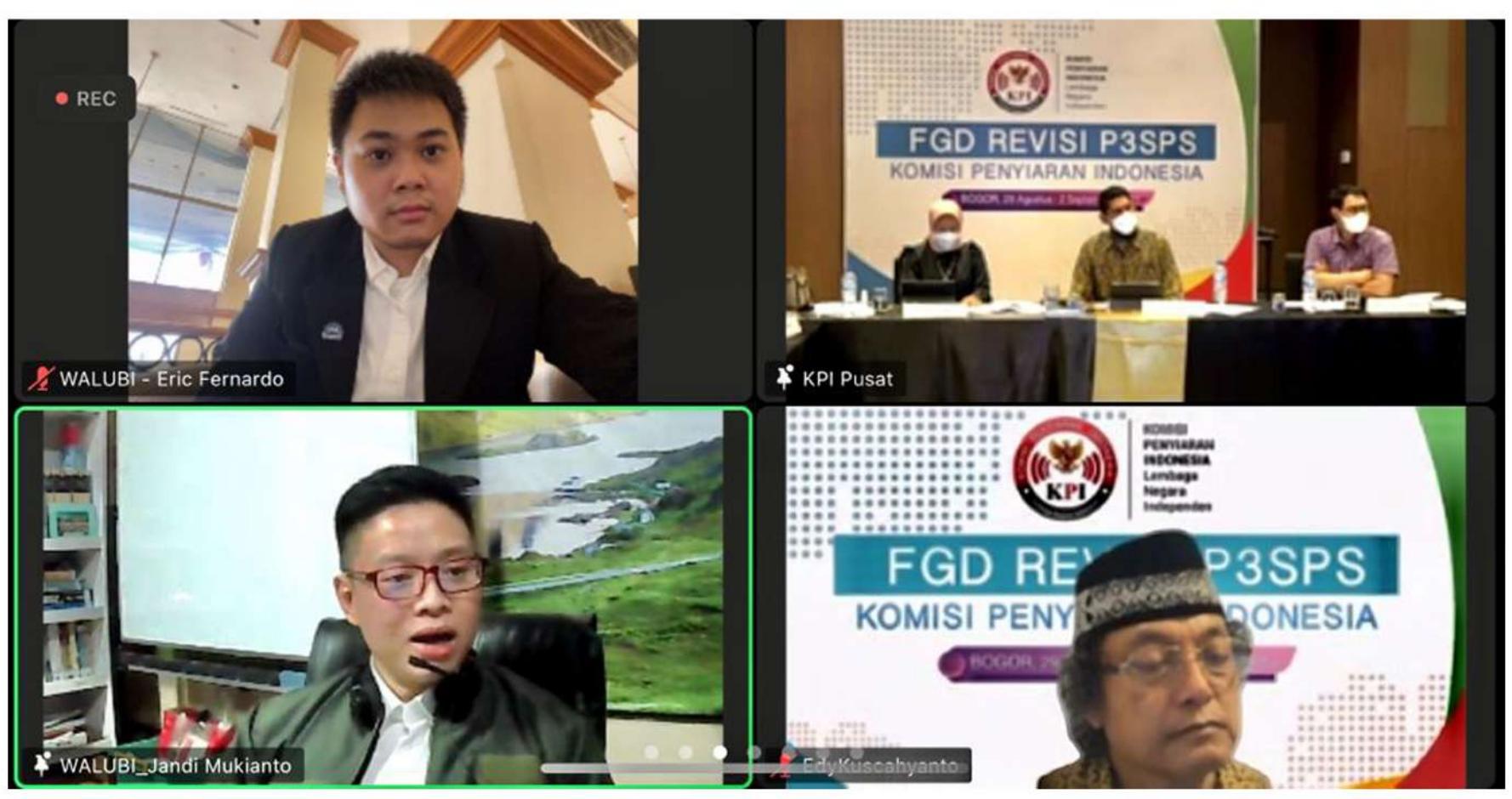
Acara yang berlangsung pada 31 Agustus 2021 secara hybrid ini dihadiri Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) serta sejumlah organisasi lain seperti Ikatan Sarja Komunikasi Indonesia (ISKI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut, Irsal Ambia selaku Komisioner KPI Pusat menyampaikan bahwa pembahasan draft dua Peraturan KPI yakni Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan amanat dari UU 32/2002 tentang Penyiaran dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“KPI ingin memastikan keterlibatan publik dalam penyusunan peraturan KPI,” ungkap Irsal Ambia.

Sementara itu hadir dari WALUBI adalah Jandi Mukianto, S.H., M.H. selaku Wakil Pelaksana Harian DPP WALUBI yang menyampaikan “WALUBI mengapresiasi komisioner KPI yang memberikan bab tersendiri pada usulan SPS dengan program siaran keagamaan, ini adalah hal yang belum ada sebelumnya dan menunjukkan bahwa ada urgensi pengaturan tentang agama pada usulan perubahan ini,” tutur Jandi.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini juga menyoroti terkait kekosongan hukum acara, “Berdasarkan pasal 55 ayat 3 UU 32/2002 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam PP, sedangkan dalam usulan SPS bila belum ada tata cara penjatuhan sanksi, maka penjatuhan sanksi dilakukan melalui rapat pleno anggota KPI, hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum khususnya berkenaan dengan formalitas/acara,” ungkap Jandi.





PASCAL®

UPS, STABILIZER & INVERTER



Mobile & Solar On-Grid/ Off-Grid INVERTER
Capacity 500-30.000 VA



Line Inter-Activ and HOME UPS (500-10.000 VA)
Modified and True-SineWave



ON-LINE SINEWAVE UPS (Singular n Modular)
Capacity 20-1200 kva



3 Phase UPS PROTEK ALP (20-1000Kva)

**PROFESSIONAL IN POWER SOLUTION
SINCE 1984**

**Showroom : Jakarta (021): Cakra com 659-6129,
0816-761135, 0813-9938 6040, 0813-9938 6040**

Website: <http://www.pascal.co.id>

Email: primacitralazuwardi@gmail.com